

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah desa dalam penyelesaian konflik masyarakat di Desa Moga, Kabupaten Pemalang. Kajian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik di Desa Moga muncul dalam berbagai bentuk seperti perkelahian antarpemuda, sengketa warisan, dan utang piutang. Faktor penyebab konflik meliputi rendahnya literasi hukum, ketimpangan ekonomi, lemahnya kontrol sosial, serta perbedaan interpretasi terhadap norma adat dan hukum formal. Pemerintah desa memiliki peran sentral sebagai mediator, fasilitator, dan edukator hukum dalam menyelesaikan konflik melalui pendekatan *musyawarah mufakat* dan prinsip *restorative justice*. Peran ini mencerminkan penerapan hukum progresif yang menempatkan keadilan substantif di atas kepastian hukum formal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan penyelesaian konflik berbasis desa bergantung pada kolaborasi antara hukum negara dan nilai sosial lokal untuk menciptakan harmoni sosial dan keadilan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pemerintah desa; konflik sosial; hukum progresif; keadilan restorative; mediasi desa.

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of village government in resolving community conflicts in Moga Village, Pemalang Regency. Using a normative-empirical legal approach, data were collected through interviews, observations, and documentation. The findings reveal that conflicts in Moga Village occur in various forms such as youth brawls, inheritance disputes, and debt conflicts. The causes include low legal literacy, economic inequality, weak social control, and differing interpretations between customary norms and formal law. The village government plays a central role as a mediator, facilitator, and legal educator, employing consensus-based dialogue (*musyawarah mufakat*) and *restorative justice* principles. This role reflects the application of progressive law, emphasizing substantive justice over procedural formality. The study concludes that successful village-based conflict resolution depends on the integration of state law and local social values to sustain social harmony and community justice.

Keywords: Village government; social conflict; progressive law; restorative justice;; village mediation.